



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 318/VI/2023
TENTANG
TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian Indeks Reformasi Hukum yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Pemerintah Kabupaten Bintan perlu melakukan pemenuhan dan penginputan data dukung ke dalam aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum serta membentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867)
10. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua Tim Kerja bertugas:

a. memastikan pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai dengan rencana;

b. memonitor pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan;

2. Anggota Tim Kerja bertugas:

a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum;

b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 JUNI 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 318/VI/2023

TANGGAL : 8 JUNI 2023

TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

- Ketua : Analis Hukum Ahli Muda (Winda Isnaeni, S.H.)
selaku Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi.
- Anggota : 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan
Muda (Ria Anika, S.H., M.H.) selaku
Subkoordinator Perundang-undangan Ahli
Muda;
2. Analis Hukum Ahli Muda (Romy Romera, S.H.,
M.H.) selaku Subkoordinator Bantuan Hukum;
3. Nina Firda Amalia, S.H. (Penyusun Bahan
Bantuan Hukum)
4. Dwi Muhardian, S.H. (Analis Permasalahan
Hukum)
5. Emillia Dwi Setiawati S., S.H. (Analis Advokasi
Hukum)
-

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN